

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Kajian Pustaka

Penelusuran pustaka terhadap topik pariwisata berbasis komunitas atau topik sejenis yang relevan pada studi ini dilakukan dengan menelusuri jurnal ilmiah via internet, buku serta berbagai publikasi cetak lainnya. Hasilnya ternyata cukup mengejutkan, yakni masih minimnya publikasi topik pariwisata berbasis komunitas di daerah perkotaan. Publikasi ilmiah yang tersedia lebih membahas penerapan *Community based Tourism* di daerah perdesaan. Tercatat berdasarkan penelusuran awal, terdapat delapan publikasi ilmiah yang membahas mengenai topik *community based tourism* di perdesaan dan empat buah artikel hasil penelitian *community based tourism* diberbagai negara. Penelusuran mengenai topik sosiologi pariwisata, tercatat ada delapan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik pariwisata berbasis komunitas. Secara umum publikasi mengenai topik pariwisata lebih melihat pariwisata sebagai aktivitas ekonomi masyarakat dan bagaimana mengembangkan industri pariwisata, dari sisi manajemennya, sehingga pembahasan mengenai peranan komunitas lokal dalam pembangunan pariwisata dan pengembangan objek dan daya tarik wisata, tidak menjadi titik fokus pembahasan, karena lebih melihat pentingnya peranan swasta atau pemerintah dalam pembangunan tersebut. Kalaupun ada hanya melihat pentingnya dukungan komunitas terhadap keberhasilan pembangunan objek dan daya tarik wisata. Setidaknya ada empat buah publikasi ilmiah yang relevan mengenai pariwisata ditinjau dari aspek manajemen. Terakhir ada sebuah satu buah publikasi ilmiah mengenai pentingnya perencanaan kota dengan menggunakan pendekatan pariwisata, yang relevan sekali dengan studi ini. Untuk lebih jelasnya berikut dibawah ini daftar publikasi ilmiah yang relevan:

- **Publikasi Pariwisata Berbasis Komunitas**

1. Hatton, Michael J. (1999). *Community Based Tourism in the Asia-Pacific*. Canada: The School of Media Studies at Humber College. Diakses melalui: <http://www.community-tourism.org/>
2. Suansri, Potjana, *Community Based Tourism Handbook* (Thailand: REST Project, 2003).
3. Murphy, P.E., *Tourism: A Community Approach* (London: Methuen, 1985).

4. Mowforth, Martin, & I. Munt, *Tourism and Sustainability New Tourism in the World* (London: Routledge, 1998).
5. Richard, Sharpley, "Tourism and Sustainable Development: Exploring the Theoretical Dvice," *Journal Of Sustainable Tourism*, VIII (1), 2000: 1-19.
6. The Mountain Institute.(2000). *Community Based Tourism for Conservation and Development: A Resource Kit*. USA: The Mountain Institute with assistance from the Regional Community Forest Training Centre
7. Garrod, Brian, *Local Partisipation in the Planning and Management of Eco -tourism: A Revised Model Approach* (Bristol: University of the West of Eng -land, 2001).
8. Konsep Tourism Product Development, co.Ltd. dikutip dari situs <http://www.tpdco.org/>
9. WWF International. (2001). *Guidelines for Community-based ecotourism development*. United Kingdom
10. Wearing, Stephen and Matthew McDonald. *The Development of Community-based Tourism: Re-thinking the Relationship Between Tour Operators and Development Agents as Intermediaries in Rural and Isolated Area Communities*. Australia: School of Leisure, Sport and Tourism Studies, University of Technology. Diakses melalui
11. *Regional Study on Community based Tourism in The Caucasus*.
12. *Community-Based Tourism: A case Study From Buhoma*, Uganda. Diakses melalui
13. Yaman, Amat Ramsa & A. Mohd, "Community -based Ecotourism: New Proposition for Sustainable Development and Environment Conservation in Malaysia," dalam *Journal of Applied Sciences IV* (4), 2004:583-589.

• **Publikasi Sosiologi Pariwisata**

1. Apostolopoulos, Yiorgos. "Reinventing The Sociology of Tourism," *The Sociology of Tourism theoretical and Empirical Investigations*. (1996). eds. Yiorgos Apostolopoulos, Stella Leivadi and Andrew Yiannakis. Great Britain: Mackays of Chatham PLC,Chatham, Kent
2. Cohen, Eric. "The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings," *The Sociology of Tourism theoretical and Empirical Investigations*. (1996). eds. Yiorgos Apostolopoulos, Stella Leivadi and Andrew Yiannakis. Great Britain: Mackays of Chatham PLC,Chatham, Kent
3. Cohen, Eric. "A Phenomenology of Tourist Experiences," *The Sociology of Tourism theoretical and Empirical Investigations*. (1996). eds. Yiorgos Apostolopoulos, Stella Leivadi and Andrew Yiannakis. Great Britain: Mackays of Chatham PLC,Chatham, Kent
4. Cohen, Eric, and Graham Dann. "Sociology and Tourism" *The Sociology of Tourism theoretical and Empirical Investigations*. (1996). eds. Yiorgos Apostolopoulos, Stella Leivadi and Andrew Yiannakis. Great Britain: Mackays of Chatham PLC,Chatham, Kent
5. Din, Kadir H. " Tourism Development: Still in Search of Mode Equitable Mode of Local Involvement," *Tourism Development Environmental and Community Issues*. (1997). eds. Chris Cooper and Stephen Wanhill. England: John Wiley & Sons Ltd.
6. Pitana, I Gde and Putu G.Gayatri. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi

7. Roche, Maurice. " Mega-Events and Micro-Modernization: on The Sociology of The New Urban Tourism," *The Sociology of Tourism theoretical and Empirical Investigations*. (1996). eds. Yiorgos Apostolopoulos, Stella Leivadi and Andrew Yiannakis. Great Britain: Mackays of Chatham PLC, Chatham, Kent
8. Wall, Geoff. "Rethinking Impacts of Tourism," *Tourism Development Environmental and Community Issues*. Eds.(1997) Chris Cooper and Stephen Wanhill. England: John Wiley & Sons Ltd.

- **Publikasi Pariwisata**

1. Elliott, James. (1997). *Tourism Politics and Public Sector Management*. London: Routledge
2. Gartner, William C. (1996). *Tourism Development Principles, Processes and Policies*. USA: Van Nostrand Reinhold
3. Mill, Robert Christie. (2000). *Tourism The International Business*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Perkasa
4. Soekadijo, R.G., (2000). *Anatomi Pariwisata Memahami Pariwisata sebagai "Systemic Linkage"*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

- **Publikasi Pembangunan Kota Wisata**

1. Gunawan, Myra P. "Pendekatan Kepariwisata dalam Perencanaan Kota," *Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21 Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. (2005). eds. Bhudy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, Gita Chandrika Napitupulu, Wahyu Mulyana. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Setelah ditelaah dari berbagai karya ilmiah tersebut dapat disimpulkan berbagai temuan penting yang berguna dan relevan, antara lain:

1. **Studi Myra P.Gunawan (2005)**, menyimpulkan bahwa dalam perencanaan pembangunan kota, pendekatan pariwisata masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan. Hal ini dikarenakan, para *stakeholders* pembangunan kota masih melihat pariwisata bukan sebuah pendekatan dalam pembangunan kota. Kondisi ini kemudian diperparah pula dengan belum dimanfaatkannya keberadaan kota-kota dengan berbagai sarana dan prasarannya, atau peninggalan sejarahnya (*heritage* kota) sebagai objek dan daya tarik wisata. Disisi lain, mengembangkan sebuah kota wisata tidak dianggap sebagai sebuah solusi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat kota dan sekaligus mengatasi persoalan-persoalan lingkungan yang ada. Sehingga, akhirnya terdapat kesenjangan antara pembangunan kota dengan pariwisata, padahal satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang signifikan.
2. **Studi Michael J Hatton (1999), Potjana Suansri (2003) , P.E Murphy (1985) dan Brian Garrod (2001)** pada umumnya berkesimpulan bahwa masyarakat lokal (komunitas lokal) dapat memberikan peranan positif dan signifikan dalam pengembangan pariwisata, khususnya objek dan daya tarik pariwisata, untuk itu masyarakat lokal perlu diberikan kesempatan untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata. Secara konseptual, pemikiran tersebut merupakan prinsip dasar pariwisata berbasis komunitas, yakni sebuah pemikiran yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui perberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga

kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat dan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Untuk itu, upaya mewujudkan pariwisata berbasis komunitas tersebut dibutuhkan sebuah perencanaan yang disusun sedemikian rupa yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan memperhatikan kepentingan wisatawan juga, dan sekaligus memperhatikan aspek sosial-budaya masyarakat dan lingkungan dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata tersebut.

3. **Martin Mowforth dan I. Munt, dan Richard Sharpley.** Berasumsi bahwa pembangunan pariwisata berbasis komunitas haruslah melakukan reservasi alam dan budaya yang ada dikomunitas tersebut, jika hal ini tidak dilakukan maka pembangunan pariwisata tersebut tidaklah bisa dianggap menjadi bagian *community-based tourism*. Oleh karena itu bagi mereka, *Community based Tourism* adalah pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. Sehingga, bisa disimpulkan *Community based Tourism* merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan dalam bentuk pembangunan pariwisata berkelanjutan.
4. **The Mountain Institute (2000), WWF International. (2001) dan Konsep Tourism Product Development, co.Ltd.,** pada intinya mengemukakan berbagai cara dan strategi pariwisata berbasis komunitas dapat dilakukan. Salah satu alat kerja yang dibangun oleh The Mountain Institute dalam rangka perencanaan dan manajemen pembangunan pariwisata berbasis komunitas adalah pendekatan *Appreciative Participatory Planning and Action (APPA)*, yang merupakan gabungan dari kerangka kerja *Appreciative Inquiry* dan *Participatory Learning and Action*. Sebagai sebuah metodologi, APPA bertujuan untuk menemukan dan meningkatkan potensi positif, sukses dan kekuatan yang terdapat dalam sebuah komunitas, kelompok dan organisasi, sehingga bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk manajemen pembangunan dan konservasi. Tidak jauh berbeda dengan The Mountain Institute, Tourism Product Development, co.Ltd lebih menekankan kepada pemberdayaan komunitas untuk menjadi lebih memahami nilai-nilai dan asset yang mereka miliki, seperti kebudayaan, adat istiadat, masakan kuliner dan gaya hidup. Dalam konteks pembangunan wisata, komunitas tersebut haruslah secara mandiri melakukan mobilisasi asset dan nilai tersebut menjadi daya tarik utama bagi pengalaman berwisata wisatawan.
5. **Studi Stephen Wearing dan Matthew McDonald, Regional Study on Community based Tourism in The Caucasus, Community-Based Tourism: A case Study From Buhoma, Uganda. Amat Ramsa Yaman, & A. Mohd.** Berbagai tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang penerapan konsep *Community Based Tourism* di berbagai negara. Intinya adalah penerapan konsep *Community Based Tourism* berhasil diterapkan sebagai salah satu strategi pembangunan masyarakat perdesaan yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga dilengkapi dengan berbagai tahapan tentang pelaksanaan *Community Based Tourism*
6. **Studi Yiorgos Apostolopoulos (1996), Eric Cohen (1996a), Eric Cohen dan Graham Dann (1996b), I Gde Pitana dan Putu G.Gayatri (2005).** Berdasarkan telaah terhadap karya-karya tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan objek baru dalam kajian sosiologi. Walaupun masih banyak tanda tanya dikalangan ahli sosiologi, apakah sosiologi pariwisata dapat berdiri dan berkembang sebagai sebuah disiplin ilmu. Karya-karya mereka, terutama Eric Cohen berhasil membuktikan bahwa pendekatan dan isu pariwisata

sangat relevan sekali menjadi objek penelitian dari Sosiologi. Kemudian karya Apostolopoulos, yang memperlihatkan bahwa pariwisata merupakan sebuah fenomena sosial yang multidimensi, krusial dan kompleks, yang membutuhkan sebuah penelaah sosiologis, contohnya dalam interaksi antara host (tuan rumah) dan wisatawan. Sebagai kesimpulan mengenai sosiologi pariwisata Pitana mengemukakan bahwa sosiologi pariwisata adalah kajian tentang kepariwisataan dengan menggunakan perspektif sosiologis, yaitu penerapan prinsip, konsep, hukum, paradigma, dan metode sosiologis di dalam mengkaji masyarakat dan fenomena pariwisata, untuk selanjutnya berusaha mengembangkan abstraksi-abstraksi yang mengarah kepada pengembangan teori

7. **Studi Eric Cohen (1996c), Kadir H. Din (1997), Maurice Roche (1996) dan Geoff Wall (1997).** Berdasarkan telaah terhadap terhadap karya-karya tersebut dapat disimpulkan bahwa sosiologi bisa diterapkan sebagai salah satu alat analisa terhadap aktivitas pariwisata. karena Sosiologi bisa digunakan untuk mengkaji tentang interaksi diantara komunitas atau individu dalam suatu objek dan daya tarik wisata. Sebagaimana karya Cohen yang melihat bahwa terdapat berbagai tipologi wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata. Geoff Wall yang melihat bahwa aktivitas pariwisata sangat berpengaruh terhadap komunitas lokal yang ada disekitar objek dan daya tarik wisata.
8. **Studi James Elliott (1997), William C. Gartner (1996), Robert Christie Mill (2000), dan R.G. Soekadijo (2000).** Berdasarkan telaah terhadap karya-karya tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan suatu gejala yang sangat kompleks di dalam masyarakat. Menjadi kompleks karena pembangunan dan pengembangan membutuhkan banyak sekali faktor pendukung, yang menuntut peran serta berbagai *stakeholder* (swasta, pemerintah, dan masyarakat). Sehingga, keberhasilan pariwisata sangat tergantung dari sinergi *stakeholders* tersebut. Tentu saja, tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam pembangunan pariwisata berbeda satu sama lain. Namun, paling tidak ada beberapa kesamaan tahap. Baik James Elliott, Garden, Robert Mill dan Soekadijo, memandang perlunya sebuah perencanaan matang dalam proses awal pembangunan pariwisata, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan pariwisata secara terukur dan terarah, sehingga hasilnya bisa tercapai sesuai rencana. Dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata tersebut, maka perlu pula dilakukan analisa dan evaluasi terhadap implementasi pembangunan pariwisata. Hal ini penting sebagai alat ukur keberhasilan pariwisata.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan pariwisata dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam pembangunan perkotaan. Dengan mengarahkan fungsi kota sebagai kota wisata. Apabila hal tersebut dilakukan maka, salah satu strategi pembangunan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan penerapan konsep *community based tourism*, yakni sebuah strategi yang menjadikan komunitas lokal di sebuah objek dan daya tarik wisata sebagai aktor utama pengembangan dan pembangunan objek dan daya tarik wisata. Penerapan konsep *Community based Development* di daerah perkotaan tentu saja

akan sangat berbeda dengan penerapan *Community based Development* di perdesaan. Melalui penerapan *Community Based Development* ini secara langsung tentu saja akan berdampak kepada komunitas lokal di sekitar objek dan daya tarik wisata, khususnya berdampak secara ekonomi, lingkungan dan sosial.

## 2.2. Kerangka Teoritik

### 2.2.1. Dinamika Komunitas Kota

Kota-kota besar<sup>12</sup>, yang biasanya berasal dari sebuah desa atau komunitas, dalam perkembangannya mengalami perkembangan yang berbeda dengan masyarakat komunitas aslinya (komunitas desa). Disparitas perkembangan desa dan kota ini muncul karena penggunaan bidang tanah untuk keperluan tertentu cenderung menentang pada satu wilayah tertentu, contohnya kawasan industri (Hoyt,1993). Seiring dengan perkembangan zaman, setiap sektor di berbagai wilayah tersebut bertambah luas sampai pada suatu perubahan tertentu dalam segi topografi terjadi dan mengubah pola perkembangan wilayah tersebut. Dimana,selanjut menurut Harris dan Ulman (1945), perkembangan wilayah tersebut telah menyebabkan munculnya pusat-pusat dunia usaha, pusat perbelanjaan, pusat bangunan pabrik dan daerah kediaman (*the multicnuclear theory*).

Sistem pemusatan tersebut bukan saja bertahan dan berkembang, namun secara tidak langsung dan secara tak sadar merubah pola interaksi sosial antara

<sup>12</sup> Sulit kiranya merumuskan definisi yang lengkap dan tepat mengenai kota. Karena, berbagai ahli tersebut cenderung membuat definisi sesuai dengan paradigmanya. Louis Wirt, misalnya, dalam *urbanization as a way of Life*, merumuskan kota sebagai "... *a relative large, dense, and permanent settlement of socially heterogenous individuals*". N.Daldjoeni (Seluk beluk masyarakat Kota, 1978), mengutip pendapat Grunfeld, seorang sosiolog Belanda, merumuskan kota sebagai suatu pemukiman dengan kepadatan penduduk yang lebih besar daripada kepadatan wilayah nasional, dengan struktur mata pencaharian non-agraris dan tataguna tanah yang beraneka rama seta dengan pergendungan yang berdirinya berdekatan. Jika pun mau ditinjau dari segi demografi penduduknya, terdapat berbagai varian mengenai jumlah sebuah penduduk dalam suatu wilayah yang bisa disebut sebagai kota, PBB mengajukan angka 200.000 jiwa; *The United States Bureau of the Census* menentukan jumlah 2500 jiwa; dan Kingsley Davis mengatakan 100.000 jiwa.

Pendapat yang paling sesuai dan lengkap mengenai kota dalam penelitian merujuk kepada pendata yang diusulkan oleh Drs.J.H.De Goode (dalam *School:Modernisasi*,1981) yang mengajukan sebuah ciri dari kota: 1) Peranan besar yang dipegang oleh sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa) dalam kehidupan ekonomi; 2) jumlah penduduk yang relatif besar; 3) Heterogenitas susunan penduduknya; dan 4) kepadatan penduduk yang relatif besar.

komunitas desa dan komunitas kota. Sehingga perbedaannya bukan hanya sebatas demografis atau aktivitas ekonomi masyarakatnya, melainkan dalam pemikiran Gino Germani bisa pula ditinjau dari sosiologi<sup>13</sup>. Dengan demikian, kota dan desa berbeda karena terdapat perbedaan struktur sosial dan pola-pola psikologis dan perilaku. Dengan demikian kota bagi Germani sangat dipengaruhi oleh volume, densitas dan heterogenitas yang merupakan variabel independen struktural yang umumnya bersifat psiko-sosial, yakni lebih dominannya hubungan sekunder, individualisme, toleransi, berpikir abstrak, universalisme, berorientasi pencapaian, terbuka terhadap perubahan, instrumentalisme dan sebagainya, disamping sisi-sisi gelapnya seperti anomie, disorganisasi sosial, kehilangan identitas, masyarakat massa dan lain-lain<sup>14</sup>.

Robert Elza Park merumuskan teori mengenai komunitas kota menjadi dua level, yakni level dasar adalah teori *biotic* dan level atas adalah *budaya*. Menurut Park, *biotic* merupakan dasar dari bangunan masyarakat (komunitas), yang melalui itu manusia bisa beradaptasi. *Biotic* itu meliputi semua kebutuhan yang diperlukan bagi manusia untuk beradaptasi dan mempertahankan kehidupannya, antara lain seperti air, udara, kesediaan tanah. Di level inilah prinsip *struggle for existence* berlangsung melalui kompetisi dan kerjasama. Ini kemudian mendorong manusia untuk hidup secara berkelompok di area tertentu, seperti area kumuh, daerah perdesaan, perkotaan, kompleks perumahan dan daerah-daerah lain. Setelah menetap, komunitas tersebut secara otomatis akan menciptakan jaringan sistem untuk melindungi kepentingannya dan keberlangsungan hidupnya<sup>15</sup>. Level atas atau budaya, yang meliputi norma, adat istiadat, hukum dan lembaga, merupakan lapisan atas dan diciptakan bersumber level *biotic*. Ini artinya, budaya diciptakan oleh komunitas (masyarakat) untuk mempertahankan eksistensinya.

Kemampuan komunitas kota untuk mempertahankan eksistensinya itulah bagi Louis Wirth (1930)<sup>16</sup>, seorang pakar sosiologi perkotaan, menyebabkan

<sup>13</sup> Lihat Gino Germani. *Modernization, Urbanization and the Urban Crisis*, (1973)

<sup>14</sup> Sebagaimana ditulis oleh S. Menno dan Mustamin Alwi. *Antropologi Perkotaan* (Jakarta: Rajawali Press, 35)

<sup>15</sup> Lihat Robert Elza Park. *The City: Suggestions for The Investigation of Human Behavior in the Urban Environment*, (1969:91-130)

<sup>16</sup> Lihat Louis Wirth, *Urbanism as a Way of Live* dalam *The Urban Sociology Reader*, Jan Lin dan Christopher Mele (ed.), (USA : Routledge:2005)

terjadinya perbedaan antar kota dan desa<sup>17</sup>. Pada saat besaran populasi sebuah kota meningkat, ini artinya meningkat juga kemajemukan dari warga yang tinggal di kota tersebut. Peningkatan tersebut juga menuntut individu-individu tersebut untuk membentuk sebuah kelompok berdasarkan persamaan ras, etnis, pekerjaan dan status sosial dalam kaitannya dengan siklus ekologis: kompetisi dan kerjasama.

Kemampuan untuk mempertahankan eksistensi inilah yang membuat masyarakat kota, yang cenderung transiensi dan anonimiti, untuk saling bekerjasama agar bisa tetap bertahan hidup<sup>18</sup>. Kondisi ini juga yang terjadi dalam dinamika masyarakat kota Jakarta. Kerasnya kehidupan Jakarta, dengan berbagai hambatan dan tantangannya membuat orang saling bekerjasama antar individu, agar tetap eksis. Kondisi itulah yang kemungkinan besar mendorong berbagai komunitas dan kelompok masyarakat yang tinggal disekitar Jalan Jaksa untuk saling bekerjasama mengembangkan objek dan dayatarik wisata malam Jalan Jaksa. Di kawasan yang relatif padat pemukiman, heterogen dan sarat kepentingan, berbagai komunitas masyarakat tersebut bisa bersama-sama bekerjasama untuk menciptakan atmosfer kekeluargaan antara komunitas lokal (*host*) dengan wisatawan. Sekaligus juga menciptakan rasa aman bagi wisatawan di kawasan jalan jaksa tersebut.

<sup>17</sup> Lihat penjelasan William A.Schwab, *The Sociology of Cities*( New Jersey: Prentice Hall,1992) hl. 13-20

<sup>18</sup> Parsudi Surpalan melihat bahwa pendapat Louis Wirth, mengenai perbedaan antar kehidupan desa dengan kota, yaitu dalam hal cara hidup atau gaya hidup perkotaan, atau dalam istilah Louis disebut sebagai urbanisme bisa dirangkum menjadi empat hal: 1) Transiensi atau orang kota tidak dapat mengenal semua orang di kotanya karena kota adalah seperti tempat kerumunan manusia, mereka datang dan pergi secara terus menerus, sehingga seorang warga kota tidak dapat dan tidak mampu untuk mengenal semua mereka itu. Karena itu antar hubungan yang ada di antara orang kota lebih bersifat superficial atau dibuat-buat dan tidak tulus karena hanya permukaan dari perasaan saja yang muncul dalam interaksi yang terwujud. 2) Anonimiti, atau tidak dikenalnya identitas pribadi. Ini merupakan akibat dari tidak mampu atau tidak dapat mengenal semua orang yang ada di kota, sehingga tidak merasa perlu untuk mengenal atau dikenal. Sehingga seorang warga kota dapat bergerak atau melangsungkan kegiatan-kegiatan diantara sesama warga kota tanpa harus sungkan karena dia tidak dikenal atau anomin. 3) Kehidupan kota menghasilkan tingkat mobilitas yang tinggi, yaitu warga kota mempunyai kemampuan untuk tidak terpaku pada tradisi-tradisi yang ada dan mempunyai kecenderungan untuk menciptakan tradisi-tradisi baru. Selain itu, mobilitas tinggi juga memiliki pengertian bahwa orang kota mempunyai kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang selalu berubah untuk manfaat dan kepentingan bagi diri mereka masing-masing. 4) Urbanisme bukan hanya milik orang kota saja, tetapi secara bertahap juga mempengaruhi cara hidup masyarakat yang terletak di daerah pinggirannya. Sebagaimana ditulis oleh Parsudi Surpalan, Op.cit.

Jejaring kepentingan inilah kemungkinan besar, yang disebut Durkheim sebagai ‘solidaritas organik’<sup>19</sup>. Dimana, pembagian kerja yang sangat kompleks telah menciptakan spesialisasi yang berbeda-beda dalam bidang pekerjaan dan peranan sosial, sehingga menciptakan ketergantungan yang mengikat orang kepada sesamanya, karena mereka tidak lagi dapat memenuhi seluruh kebutuhan mereka sendiri. Contohnya terlihat jelas dari spesialisasi pekerjaan yang berbeda-beda pada komunitas jalan Jaksa, dimana ada warga setempat yang menjadi pramusaji, tukang ojek, pedagang makanan dan minuman, penyedia rumah singgah, karyawan dan sebagainya, dimana semua individu tersebut terikat dalam satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain. Tidak berfungsinya satu jenis pekerjaan akan menimbulkan kepincangan dalam pelayanan produk wisata bagi wisatawan.

Spesialisasi pekerjaan yang terjadi terhadap komunitas Jalan jaksa, tidak bisa diartikan secara vulgar sebagai bentuk modern dari perluasan individualisme sebagaimana yang diungkapkan oleh Durkheim<sup>20</sup>. Melainkan sebagai sebuah bentuk penguatan individu melalui komunitas demi satu kepentingan bersama. Ini artinya komunitas akan lebih berperan dalam perkembangan objek dan daya tarik wisata jalan Jaksa. Penguatan komunitas ini, jangan pula diartikan secara *vis a vis* sebagaimana teori Ferdinand Tonnies mengenai *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft* sebagai dua bentuk yang menyertai perkembangan kelompok sosial<sup>21</sup>. Namun

<sup>19</sup> Ada dua solidaritas menurut Durkheim satu adalah solidaritas organik yang muncul di dalam masyarakat modern dan solidaritas mekanis’. Solidaritas mekanis itu muncul di masyarakat tradisional dan dipersatukan oleh kenyataan bahwa setiap orang lebih kurang sama, dan karenanya mempunyai banyak kesamaan di antara sesamanya. Oleh Durkheim kesadaran kolektif tersebut sepenuhnya mencakup kesadaran individual – [norma-norma sosial](#) kuat dan [perilaku sosial](#) diatur dengan rapi. Lebih jelas baca Durkheim “Pembagian Kerja dalam Masyarakat” (1893)

<sup>20</sup> Lihat Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, (Jakarta:UIP,1986) hln 91  
<sup>21</sup> *Gemeinschaft* atau paguyuban dipahami sebagai sebuah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggota diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Sedangkan *Gesellschaft* (patembayan) merupakan bentuk kehidupan bersama yang merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu yang pendek. *Gesellschaft* strukturnya bersifat mekanis sebagaimana dapat diumpamakan pada sebuah mesin Lihat. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,1999) hlm 448. Linda Darmajanti, dalam disertasi menjelaskan bahwa teori Ferdinand Tonnies pada hakekatnya berusaha merumuskan tipologi ideal dari perbedaan bentuk masyarakat. Beranjak dari situ pemikiran Ferdinand Tonnies dengan “Gemeinschaft” bisa diartikan dengan sebagai komuniti tradisional, sedangkan “Gessellschaft” adalah masyarakat modern. Ditandai dengan, proses modernisasi yang telah membawa perubahan sosial yang cepat dan berpengaruh dalam pola kehidupan sehari-hari. Lihat Linda Darmajanti, Kehidupan Berorganisasi sebagai

lebih kepada sebuah perpaduan unik bagi komunitas jalan Jaksa tetap terikat sebuah hubungan batin satu kesatuan sebagai komunitas Jaksa dan sekaligus pula mempunyai kemampuan adaptif untuk mengikuti perkembangan modernisasi dan globalisasi yang terjadi.

### 2.2.2. Modal Sosial Komunitas Jalan Jaksa

Berdasarkan observasi awal, komunitas jalan Jaksa tersebut mempunyai lima aspek yang menjadi modal dasar, yakni kepercayaan, sarana dan prasarana sosial, organisasi, aktivitas ekonomi dan proses pembelajaran. Lima modal dasar tersebut berhasil dimanfaatkan sedemikian rupa oleh komunitas jalan jaksa untuk pengembangan objek dan daya tarik wisata, sehingga setiap individu dan kelompok masyarakat dapat mengambil manfaat. Yang terjadi kemudian adalah timbulnya jaringan sosial antar berbagai individu tersebut untuk saling mengamankan kepentingannya. Kondisi ini, sebagaimana dikemukakan oleh Putnam hanya mungkin terjadi jika ada koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya diantara sesama anggota masyarakat. Kepercayaan ini memiliki implikasi positif dalam kehidupan masyarakat, yakni dibuktikannya suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu (*trust lubricate social life*). Sejak didirikan oleh Lawalata, tahun 60-an hingga kini, terbukti bahwa kerjasama yang dilandasi oleh kepercayaan tersebut tetap bertahan dan mampu bersaing dengan objek dan daya tarik wisata lainnya di kota Jakarta. Keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada jaringan ini yang mendorong kebersamaan dan kerjasama komunitas jalan jaksa untuk terus mengoptimalkan atraksi wisata yang ada, salah satunya dengan menyelenggarakan festival jalan Jaksa<sup>22</sup>. Ini artinya kapital sosial disini berfungsi memperlancar dan mempererat ikatan-ikatan sosial

---

Modal Sosial Komunitas Jakarta (Disertasi Doktor Program studi Sosiologi Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Tidak diterbitkan, 2005) hlm.33

<sup>22</sup> Putnam (1993a, 1993b, 1995, 1996, 2000) melihat bahwa kapital sosial bisa diidentifikasi sebagai: "*features of social organisation, such as networks, norms and trust, that facilitate coordination and co-operation for mutual benefit* (1993:36). Asumsi yang dikembangkan oleh Putnam dari konsep kapital sosialnya, yakni: (1) adanya jaringan hubungan dengan norma-norma yang terkait; dan (2) saling mendukung guna mencapai keberhasilan di bidang ekonomi bagi orang-orang yang termasuk dalam jaringan tersebut.

dalam sistem produksi. Kapital sosial merupakan '*public good*', bukan milik pribadi (*private property*) dari mereka yang mengambil manfaat darinya.<sup>23</sup>

Berdasarkan observasi awal, juga belum terlihat adanya paksaan dalam melakukan kerjasama antar anggota komunitas Jalan Jaksa, jadi sebagai kesimpulan awal bisa dikatakan bahwa kerjasama yang terjadi bersifat sukarela. Sebagaimana dijelaskan oleh Putnam bahwa kerjasama sukarela lebih mudah terjadi didalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah kapital sosial yang substansial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik dan jaringan-jaringan kesepakatan antar warga. Aturan-aturan pertukaran timbal balik dan jaringan kesepakatan antar warga yang menjadi basis kerjasama sukarela itu biasanya tercipta, bila tingkat partisipasi yang setara dan adil (*equal participation*) didalam komunitas sudah terwujud.

Kondisi yang terjadi di Komunitas jalan Jaksa tersebut secara tidak langsung membatah pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada aktivitas ekonomi masyarakat haruslah dipisahkan dengan kehidupan sosial masyarakat. Asumsi ini muncul karena adanya anggapan bahwa faktor non-ekonomi (sosial) akan menjadi beban dalam aktivitas ekonomi. Kondisi yang terjadi di jalan Jaksa, terlihat dengan jelas bagaimana aktivitas ekonomi (industri pariwisata) menjadi bertahan dan berkembang karena aktivitas sosial dari komunitas lokal. Kondisi inilah yang disebut oleh Mark Granovetter, sosiolog Amerika, dengan istilah *social embeddedness of the economy*, yakni bahwa dalam setiap aktivitas sosial melekat juga kegiatan ekonomi. Granovetter berkonsep bahwa pada saat kegiatan ekonomi dan non-ekonomi dipadukan, tidak selamanya kegiatan non-ekonomi akan mempengaruhi biaya (*cost*) dan teknik yang ada dalam tindakan ekonomi.<sup>24</sup> Hal ini sangat tergantung kemampuan aktor ekonomi mampu mempergunakan variabel non-ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya atau organisasi. Untuk itu menurut Granoveter apabila itu yang terjadi maka harus dipikirkan sebuah solusi dengan memanfaatkan modal sosial yang ada sehingga aktivitas ekonomi masyarakat bisa berinteraksi dengan institusi sosial masyarakat demi meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan bagi komunitas tersebut.

---

<sup>23</sup> Lihat kajian tentang konsep *capital social* Putnam yang dilakukan oleh Lubis (2002).

<sup>24</sup> Lihat Granovetter "*The Impact of social structure on Economic Outcomes*".

### 2.2.3. Manajemen Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas

Obyek dan daya tarik wisata (*attractor dan attraction*) merupakan alasan utama mengapa suatu wilayah dikunjungi oleh wisatawan dan menjadi destinasi wisata. Untuk itu dibutuhkan sebuah perencanaan matang terhadap pengembangan objek dan daya tarik wisata agar diminati wisatawan. Menurut Garrod (2001:4), pendekatan yang paling sesuai adalah perencanaan partisipatif. Salah satu bentuk perencanaan partisipatif dalam pembangunan pariwisata adalah dengan menerapkan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pendekatan pembangunan ODTW.

Suansri (2003:14) mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. Untuk itu ada beberapa prinsip dasar CBT yang disampaikan Suansri (2003:12) dalam gagasannya yaitu: 1) mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata, 2) mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek, 3) mengembangkan kebanggaan komunitas, 4) mengembangkan kualitas hidup komunitas, 5) menjamin keberlanjutan lingkungan, 6) mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal, 7) membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas, 8) meng-hargai perbedaan budaya dan martabat manusia, 9) mendistribusikan keuntungan secara adil pada anggota komunitas, 10) berperan dalam menentukan prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek yang ada di komunitas. Ide utama yang disampaikan Suansri dalam prinsip dasar tersebut adalah hubungan yang lebih seimbang antara pemilik modal dan masyarakat lokal dalam industri pariwisata. Keseimbangan yang dimaksud antara lain dalam hal status kepemilikan komunitas, pembagian keuntungan yang adil, hubungan sosial budaya yang didasari sikap saling menghargai, dan upaya bersama untuk menjaga lingkungan.

Tidak berbeda jauh dengan Suansari, Prof. Michael J. Hatton dalam bukunya yang berjudul *Community-Based Tourism in the Asia-Pacific* mengemukakan bahwa industri pariwisata komunitas (*community tourism industry*) adalah kumpulan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh komunitas yang menciptakan dan menjual berbagai macam barang dan servis kepada wisatawan.

Oleh karena itu, yang menjadi persoalan kemudian adalah bagaimana menerapkan konsep dan nilai dasar *Community based tourism sebagai* strategi untuk memobilisasi komunitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ODTW sebagai patner industri pariwisata. Dalam konteks pembangunan wisata, komunitas tersebut haruslah secara mandiri melakukan mobilisasi modal sosial, asset dan nilai yang ada dalam komunitasnya tersebut untuk menjadi daya tarik utama bagi pengalaman berwisata wisatawan.

Untuk itu tujuan utama penerapan *Community based tourism dalam konteks ODTW* Jalan Jaksa, adalah bagaimana setiap individu dalam komunitas diarahkan untuk menjadi bagian dalam rantai ekonomi pariwisata. Hal ini hanya terjadi jika para individu dilibatkan dalam setiap proses pengembangan ODTW dan sekaligus diberikan ketrampilan untuk mengembangkan produk wisata dalam bentuk *small business*. Produk wisatanya tidak bisa dilepaskan di bidang atraksi wisata, jasa pendukung pariwisata dan transportasi<sup>25</sup>. Dalam tiga aspek tersebutlah produsen, baik itu swasta, publik dan komunitas lokal berusaha memberikan pelayanan terbaik agar wisatawan sebagai konsumen terpenuhi kebutuhannya.

Oleh karena itu yang dibutuhkan kemudian adalah bagaimana manajemen pembangunan objek dan daya tarik wisata Jalan Jaksa dengan berdasarkan prinsip *community based tourism*. Namun, harus menjadi catatan penting dalam proses manajemen tersebut adalah saat ini objek dan daya tarik jalan jaksa dalam pengembangan<sup>26</sup>. Ini artinya, bahwa saat ini objek dan daya tarik wisata bisa jadi

<sup>25</sup> Lihat Soekadijo, R.G., *Anatomi Pariwisata Memahami Pariwisata sebagai "Systemic Linkage"*. (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama 2000).

<sup>26</sup> William C. Gatner (1996) dalam bukunya yang berjudul *Tourism Development Principles, Processes, and Policies*, mengemukakan bahwa pembangunan pariwisata harus dilihat sebagai sebuah proses yang sifatnya berkelanjutan. Sebagai sebuah proses, maka pembangunan pariwisata haruslah melewati tahap-tahap tertentu. Mengutip pendapat Butler (dalam Gatner, 1996) setidaknya ada enam tahapan pembangunan pariwisata: tahap 1 adalah *explorasi*, dimana sekelompok kecil turis mengunjungi daerah wisata tertentu; tahap 2 adalah tahap partisipasi, ditandai dengan dibangunnya tempat akomodasi dan catering pariwisata oleh komunitas lokal; tahap 3 adalah pembangunan, ditandai dengan pembangunan sarana dan prasarana secara masif yang menyediakan segala kebutuhan wisatawan. *Advertaising* dan promosi memegang peranan penting dalam rangka memasarkan destinasi pariwisata ini. Tahap ini merupakan tahap kritis, karena dampak dari pembangunan tersebut haruslah diperhitungkan dengan seksama. Tahap selanjutnya adalah konsolidasi, dimana daerah wisata tersebut mulai dikenal oleh para komunitas lokal dan dimulainya kedatangan para wisatawan. Tahap kelima, adalah tahap stagnasi, hal ini terjadi apabila daerah wisata tersebut tidak melakukan inovasi-inovasi atraksi

sudah memasuki tahap stagnasi, sehingga perlu dilakukan pengembangan produk dan atraksi wisata untuk kembali menarik minat wisatawan agar berkunjung.

Dalam titik kritis inilah, maka sangat diperlukan sebuah kerjasama antara investor, komunitas lokal dan pemerintah untuk bersama-sama melakukan pembenahan terhadap kondisi kritis yang dialami oleh objek dan daya tarik wisata Jalan Jaksa. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. James Elliott bahwa pembangunan pariwisata tidak bisa dilepaskan dari peranan pemerintah<sup>27</sup>. Karena hanya pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan untuk menciptakan stabilitas politik, keamanan dan menyediakan kepastian hukum dalam sektor finansial yang diperlukan bagi sektor pariwisata. Dalam rangka melakukan pengembangan terhadap objek dan daya tarik wisata Jalan Jaksa, maka dapat dilakukan dengan berbagai cara dan strategi. Berikut dibawah ini langkah-langkah umum yang bisa dijadikan acuan merujuk pendapat Hatton<sup>28</sup>:

1. *Getting organized.* Hal pertama yang perlu dilakukan adalah komunitas tersebut menyusun team kerja untuk membangun dan menyusun berbagai langkah dan prosedur untuk membangun objek dan daya tarik wisata. Team ini haruslah berfokus kepada aksi.
2. *Identify community values.* Luangkan waktu untuk menentukan apa sebenarnya yang diharapkan oleh komunitas dari wisatawan, fokuskan mengenai kontribusi apa yang diberikan dan apa yang tidak akan diberikan. Usahakan untuk melakukan survey kepada anggota komunitas untuk mengetahui nilai dan ketertarikan mereka. Hal terpenting lainnya adalah mengetahui hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh wisatawan.
3. *Visioning process.* Buatlah rapat atau pertemuan anggota komunitas, untuk secara bersama-sama dan partisipatif merumuskan visi dan menyusun tujuan. Usahakan untuk mendapatkan keterlibatan komunitas dan komitmen mereka diakhir pertemuan.
4. *Inventory of attractions.* Tentukan apa yang akan ditawarkan komunitas tersebut kepada wisatawan. Identifikasi atraksi tersebut berdasarkan kategori dan tipologi wisatawan apa yang sesuai dengan atraksi tersebut.
5. *Assessment of attractions.* Langkah selanjutnya adalah melakukan analisa mendalam setiap detail dari atraksi tersebut, termasuk didalamnya kualitas atraksi dan target wisatawan yang dituju.
6. *Establish Objectives.* Perlakukan atraksi sebagaimana layaknya unit bisnis, untuk itu tentukan tujuan dari setiap unit bisnis tersebut, lengkapi dengan analisa biaya dan keuntungan.

---

wisata tertentu, sehingga jumlah kedatangan wisatawan menurun. Apabila hal ini terjadi, maka pembangunan pariwisata, bisa mengarah kepada penurunan atau bisa juga tahap untuk membangun kembali. Semua itu tergantung dari kemampuan *stakeholders* dalam mengoptimal potensi yang ada.

<sup>27</sup> Prof. James Elliott dalam bukunya yang berjudul "*Tourism: Politics and Public Sector Management*"

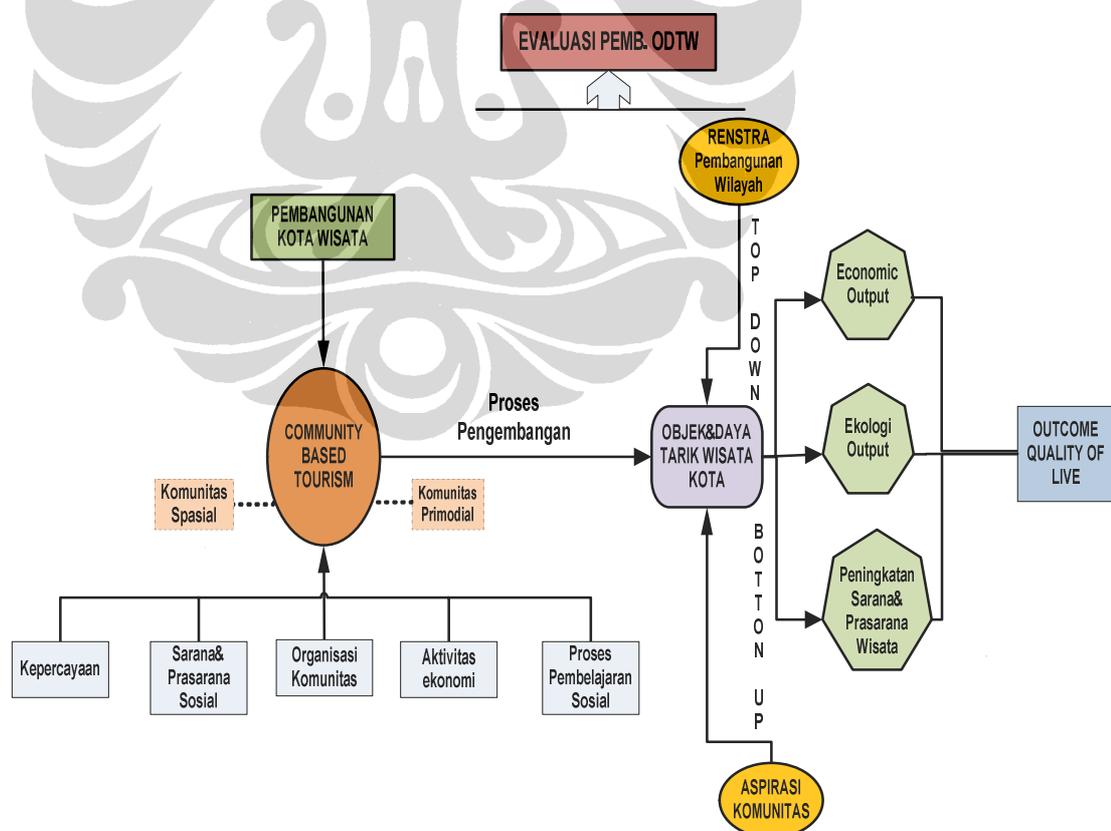
<sup>28</sup> Op.cit. Hatton

7. *Impact Analysis*. Tentukan potensi ekonomi, sosial dan biaya lingkungan. Buatlah rencana berkelanjutan untuk meminimalisir dampak dari biaya-biaya ini.
8. *Business Plan*. Tentukan prioritas, tentukan goal yang ingin dicapai setiap tahun, termasuk sumber keuangan.
9. *Marketing Plan*. Rencanakan strategi marketing untuk setiap atraksi.

Dalam setiap langkah yang diambil dalam rangka pembangunan pariwisata, Hatton menegaskan akan pentingnya keterlibatan aktif komunitas. Dalam setiap level, pemberian pendidikan dan kesadaran akan pentingnya komunitas dalam pembangunan pariwisata perlu dilakukan. Hal ini penting untuk dilakukan karena, fokus utama dari pembangunan pariwisata berbasis komunitas adalah bagaimana komunitas tersebut bisa memperoleh manfaat dari setiap atraksi yang ada, bila hal ini tidak terjadi maka ini merupakan tanda dari kegagalan pembangunan pariwisata berbasis komunitas.

### 2.3. Kerangka Pikir Penerapan *Community based tourism* dalam Pembangunan Pariwisata Kota

Adapun kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Diagram 2.1.**  
**Konseptual Framework Pembangunan Kota Pariwisata Berbasis Komunitas**

Berdasarkan diagram satu diatas, terlihat bahwa konsep-konsep yang disebutkan sebelumnya diatas menjadi relevan. Pembangunan kota wisata, bisa diartikan merupakan transformasi fungsi dan peran kota Jakarta yang selama ini sebagai pusat produksi menjadi pusat konsumsi, dalam hal ini adalah pariwisata. Perubahan fungsi ini menjadi penting, karena cepat atau lambat kualitas hidup dan lingkungan di kota Jakarta akan mengalami penurunan dan mencapai titik nadirnya. Untuk itu diperlukan sebuah pola pembangunan baru yang berkeberlanjutan. Hal itu bisa dicapai dengan menerapkan pembangunan pariwisata sebagai arah baru pembangunan kota. Kota Jakarta yang selama ini menjadi pusat dari segala kegiatan daerah pinggiran kota, bahkan Indonesia pada umumnya, harus mulai secara perlahan mengalihkan fungsi yang dimiliki kepada daerah-daerah lain, sehingga beban pembangunan tidak terpusat di kota Jakarta. Untuk itu dengan pembangunan kota pariwisata, maka secara otomatis fungsi kota yang lain diberikan kepada daerah sekitar, sehingga terjadi pertumbuhan pusat-pusat kota baru yang mempunyai fungsi dan peran berbeda dengan Jakarta.

Pertanyaan selanjutnya adalah, mungkinkah dan bagaimana pembangunan kota wisata tersebut dilakukan? berdasarkan kajian pustaka dan telaah teori yang dilakukan pembangunan itu dapat dilakukan melalui pembangunan komunitas. Pendekatan *Community based tourism* ini sangat berbeda dengan pendekatan pembangunan pariwisata pada umumnya. Dimana, komunitas merupakan aktor utama dalam proses pembangunan pariwisata, dengan tujuan utama adalah untuk peningkatan standar kehidupan ekonomi masyarakat tersebut. Sehingga pola *Community based tourism* merupakan pendekatan yang fokus pada kelompok kecil, didesign secara lokal dan dioperasikan oleh komunitas untuk kebaikan bagi wisatawan, penyedia jasa dan berwawasan lingkungan.

Pariwisata berbasis komunitas ini secara konseptual merupakan konsep yang telah lama digunakan oleh para perencana pembangunan pariwisata, namun selama ini konsep tersebut selama ini baru dilakukan terbatas di daerah *rural* atau perdesaan belum pernah diterapkan dalam konteks masyarakat kota yang heterogen. Sehingga, penerapan pendekatan *Community based tourism* dalam pembangunan perkotaan, harus diperhatikan bahwa terdapat perbedaan antara komunitas yang tinggal di daerah perdesaan dengan komunitas kota. Komunitas

perkotaan sebagaimana diungkapkan pada kerangka teori, sangat kompleks dan tidak bisa didefinisikan secara general. Namun, ada beberapa aspek yang bisa ditarik sebagai benang merah mengenai komunitas kota: 1) komunitas bisa diibaratkan sebagai kesatuan ekologis; 2) bahwa anggota komunitas mempunyai kemampuan untuk bekerjasama dalam rangka mempertahankan eksistensinya; 3) bahwa relasi yang terjadi antar anggota dalam komunitas, atau individu dengan komunitas dan juga komunitas dengan komunitas untuk dapat bekerjasama haruslah dilandasi oleh kepercayaan diantara mereka, tanpa kepercayaan tidak mungkin timbul kerjasama; 4) bahwa komunitas kota juga mempunyai modal sosial yang berguna bagi pengembangan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu pembangunan pariwisata berbasis komunitas haruslah mempertimbangan empat aspek ciri dari komunitas perkotaan tersebut.

Kemudian, berdasarkan observasi awal, komunitas jalan Jaksa tersebut bisa dibagi menjadi dua kelompok, yakni komunitas spasial dan primordial. Komunitas spasial adalah komunitas yang dibentuk berdasarkan kesamaan kewilayahan, yakni sama-sama beraktivitas ekonomi atau tinggal di sekitar jalan jaksa. Sedangkan komunitas primordial adalah komunitas yang dibentuk berdasarkan kesamaan etnis, contohnya adalah komunitas betawi di Jalan Jaksa yang tergabung dalam organisasi Forum Betawi Rempug. Walaupun anggota kedua organisasi tersebut memiliki perbedaan, namun para anggota komunitas tersebut berkepentingan menjaga kelestarian objek dan daya tarik wisata Jalan Jaksa. Sehingga keberadaan *host*, baik itu komunitas spasial atau primordial menjadi kata kunci dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas

Ada lima aspek yang menjadi modal dasar komunitas jalan jaksa, yakni kapital sosial, sarana dan prasarana sosial, organisasi sosial, aktivitas ekonomi dan proses pembelajaran sosial antar host dan wisatawan asing. Kelima potensi dasar tersebut harus dapat dimanfaatkan sedemikian rupa dalam penerapan *Community based Tourism*. Selanjutnya di dalam proses pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata tersebut tentu saja, harus disinkronisasikan antara aspirasi komunitas lokal tersebut dengan rencana strategis pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai terjadi overlapping, bahkan konflik antar komunitas dengan pemerintah daerah. Setelah kesepakatan-kesepakatan sosial

diperoleh dan kebijakan pembangunan di lakukan maka penting sekali dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala, untuk melihat apakah tujuan yang dicapai telah berhasil. Tujuan yang ingin dicapai, setidaknya ada 3, yakni ekonomi, ekologi dan pembangunan sarana dan prasarana. Diharapkan setelah tercapainya output tersebut, akan diperoleh *outcome* peningkatan kualitas hidup komunitas tersebut.

